

Pria Penjaga Kandang Ayam di Bogor Dibunuh di Gubuk

CIBINONG (IM)- Seorang pria berinisial N (50) tewas diduga menjadi korban penganiayaan di Desa Cibalong, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih menyelidiki kejadian tersebut.

Kapolsek Cijeruk, AKP Sumijo mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (5/8) siang. Korban ditemukan oleh bersimbah darah, di sebuah gubuk dekat kandang ayam. Sumijo mengatakan, korban memang kerap terlihat berada di lokasi kejadian. Sebab, N merupakan orang kepercayaan pengusaha ayam untuk menjaga keamanan.

"Korban sedang di gubuk karena beliau ini tokoh yang dipercaya pengusaha ayam untuk keamanan, sehingga sesekali korban ada di lokasi itu," kata Sumijo melalui keterangannya, Jumat (6/8).

Ketika korban tengah berada di gubuk seorang diri, lanjutnya, seorang pria berinisial D (35) yang diduga pelaku datang berbincang dengan korban. Keduanya saling mengenal satu sama lain. Sumijo melanjutkan, sekitar lima menit berselang, D pergi dari lokasi dan datang lagi ke

gubuk sekitar 10 menit kemudian. "Korban pesan kopi ke warung dengan isyarat teriak untuk berdua. Tukang kopi datang untuk bertanya, terus kembali untuk menyiapkan kopinya," jelas Sumijo. Akan tetapi, ketika tukang kopi datang membawa kopi ke gubuk, terlihat diduga pelaku terburu-buru pergi dengan motornya. Sumijo mengatakan, saat itu korban sudah kondisi tergeletak bersimbah darah.

Sang tukang kopi pun bertolak, sehingga adik korban yang berada tidak jauh dari lokasi mendengar sumber suara. Segera, korban dibawa ke sebuah rumah sakit di Kota Bogor. Namun nahas, Sumijo mengatakan, korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat desa dan pihak kepolisian. Sumijo mengungkapkan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian sementara (TKP), korban diduga dianiaya dengan benda tajam pada bagian leher. "Anggota meluncur olah TKP, betul di gubuk tersebut ada terdapat percikan noda darah, dilustrasikan benar telah terjadi perbuatan pidana," tambahnya. ● **gio**

Masyarakat Adat Ciptagelar Dukung Program Vaksinasi

SUKABUMI (IM)- Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kekebalan komunal dengan mengikuti vaksinasi Covid-19. Antusias masyarakat setempat mengikuti vaksinasi harus terkendala dengan pasokan vaksin.

Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kekurangan vaksin. Tokoh adat Ciptagelar, Egi Hegriana Subakti mengatakan, awalnya vaksin dosis pertama masih sedikit warga yang ikut namun setelah menerima sosialisasi yang lebih intensif dari aparat pemerintah warga antusias mengikuti vaksin di dosis kedua.

Dia mengatakan tingginya antusias warga mengikuti vaksin dikarenakan para tokoh setempat telah mengikuti vaksin. "Kalau tokoh adatnya ikut vaksin otomatis warganya juga ikut vaksin, ini bukti bahwa masyarakat Ciptagelar ikut aturan pemerintah dan tak menolak vaksin," ujar dia.

Ia memperkirakan warga yang mengikuti vaksin mencapai 40 persen dari jumlah penduduk Ciptagelar. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan ketersediaan vaksin yang diberikan. Dia mengatakan dukungan kepada pemerintah tak hanya saat vaksinasi namun sudah dimulai saat penerapan PSBB pada Maret 2020 lalu. Saat itu Desa adat Ciptagelar

tak menerima tamu dari luar. Hingga saat ini penerapan PPKM warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan kemudian juga masyarakat tidak panik menghadapi pandemi Covid-19 sehingga Ciptagelar statusnya tetap zona hijau.

Egi berharap pasokan vaksin dapat terpenuhi sehingga seluruh masyarakat Ciptagelar dapat mengikuti vaksin. Apalagi vaksin menjadi salah satu syarat perjalanan yang ditetapkan pemerintah.

Keikutsertaan warga di Ciptagelar dalam vaksinasi merupakan upaya mendukung agar pandemi segera berakhir sehingga aktivitas kembali normal sehingga menggerakkan roda perekonomian seperti sedia kala. "Selain pengajar, ada seniman yang selama pandemi tak mempunyai pemasukan, juga ada petani sayuran. Dalam skala besar mereka tak bisa menjual panen ke luar desa disebabkan persyaratan perjalanan harus mengikuti vaksin," katanya.

Sementara untuk skala kecil warga Ciptagelar masih dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Sayur mayur berupa cabai tomat dan lainnya dipergunakan untuk memasak serta keperluan untuk syukuran adat. "Hasil panen masih tercurup sebab di sini sesuai aturan adat tak boleh diperjualbelikan sehingga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang disimpan di lumbung padi," tuturnya. ● **pur**



IDN/ANTARA

LAYANAN JEMPUT BANK SAMPAH

Petugas Bank Sampah mendata sampah yang diambil dari rumah warga di Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/8). Layanan jemput sampah ke rumah menjadi pilihan bagi warga untuk menabung atau bersedekah melalui Bank Sampah saat pembatasan mobilitas warga saat pandemi COVID-19.

1.300 Anak Yatim Dapat Bantuan Sembako dari Pemkot Tangerang

TANGERANG (IM)- Sebanyak 1.300 anak yatim mendapat bantuan dari Pemkot Tangerang. Bantuan itu disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos), untuk 1.300 anak yatim di dalam maupun di luar panti asuhan, berupa bantuan sembako (makanan).

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako kepada sejumlah perwakilan yatim penerima bantuan di wilayah Kecamatan Larangan. "Semoga bermanfaat ya dik, untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Arief kepada salah satu yatim penerima bantuan peranakan di Kelurahan Larangan Indah, Larangan, Jumat (6/8).

Arief menjabarkan bantuan paket peranakan bagi anak yatim diberikan kepada sebanyak 1.300 orang baik yang tinggal di panti asuhan maupun di lingkungan masyarakat.

"Ada 22 panti asuhan den-

gan yatim penerima bantuan sebanyak 551 orang," ujarnya. Namun bukan hanya dalam panti asuhan saja yang mendapat bantuan tersebut, yang di luar panti asuhan ada sebanyak 749 orang," jelas Wali Kota yang didampingi Camat Larangan, Marwan.

"Dan bantuan ini sudah ketiga kalinya diberikan dalam tahun ini," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin juga turut memberikan bantuan peranakan kepada perwakilan yatim di bilangan Kecamatan Nglarasari dan Batu-ceper. "Bantuan ini sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Tangerang untuk warganya," pungkas Sachrudin. Sekadar diketahui, paket bantuan peranakan bagi yatim yang diberikan oleh Pemkot Tangerang berisi 5 kg beras, minyak goreng, makanan kaleng dan susu. ● **pp**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

JALAN RUSAK TAK KUNJUNG DIPERBAIKI

Pengendara melintasi jalan penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang rusak di Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/8). Jalan rusak serta berlubang tersebut dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas, dan sudah berbulan-bulan tidak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah setempat.

Ribuan Pegawai di Tempat Wisata Kab. Bandung Nganggur Akibat PPKM

Pemerintah diminta segera menghentikan PPKM atau paling tidak memberikan kelonggaran. Agar usaha jasa wisata bisa bangkit kembali. Karena jika terus seperti ini tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak usaha yang tutup dan merumahkan pegawainya.

BANDUNG (IM)- Pembatalan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, menyebabkan sekitar 8000-an karyawan hotel restoran dan objek wisata di Kabupaten Bandung dirumahkan. Tak hanya itu, karena tak beroperasi, banyak pemilik tempat usaha wisata yang hendak menjual tempat usahanya.

Ketua I Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung,

Sungko Wibowo mengatakan, kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah menyebabkan usaha mereka sekarat. Betapa tidak, karena PPKM, semua usaha jasa wisata seperti hotel, restoran, objek wisata air dan lainnya kehilangan pengunjung.

"Di Kabupaten Bandung ada sekitar 600-700 an usaha hotel, restoran, objek wisata besar kecil. Dengan jumlah karyawan antara 7000

hingga 8000 orang. Itu sebagian besar sudah dirumahkan, contohnya di objek wisata Kampung Batu, pegawainya ada 60 orang, sekarang cuma tujuh orang. Kemudian hotel Albis itu sudah digembok, yang kerja tinggal satu orang managernya saja merangkap jadi satpam, tukang kebun dan bersih-bersih," kata Wibowo melalui sambungan telepon, kemarin.

Kondisi ini, kata Wibowo, jika PPKM terus diberlakukan maka usaha mereka akan benar-benar mati. Karena, meskipun usahanya tak beroperasi, namun berbagai kewajiban seperti membayar listrik, gaji pegawai, cicilan bank dan lainnya harus tetap dibayar. Akibatnya, banyak pemilik yang terpaksa hendak menjual tempat usahanya. Karena memang sudah tidak sanggup untuk memenuhi berbagai kewajiban tersebut.

PEMERATAAN BAGI YANG TAK DAPAT

Kades Pasir Talaga: BST Dipotong 50 Persen, Atas Persetujuan Warga

KARAWANG (IM)- Kepala Desa Pasir Talaga, Karawang, Yani Utari Indrayani angkat bicara terkait potongan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga sebesar 50 persen. Dia mengklaim pemotongan BST tersebut sudah atas persetujuan warga.

"Anggaran PPKM tahun 2021, yang bersumber dari dana desa tidak ada. Anggaran tersebut sudah dicairkan oleh kepala desa lama beberapa hari menjelang Pilkada dan tidak ada serah terima pertanggungjawaban terkait anggaran tersebut.

Sementara itu, BST yang bersumber dari anggaran Kemensos banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan warga yang sudah meninggal masih terdaftar dan bukan warga desa malah mendapatkan bantuan, juga warga yang sudah pindah masih terdaftar. Dari carut marut dan tumpang tindih itulah saya inisiatif memotong BST, namun atas persetujuan masyarakat," kata Yani saat dihubungi melalui telepon selular, Jumat (6/8).

Yani menegaskan pemotongan BST tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat. Karena, kata dia, masih ada warga yang tidak menerima BST padahal ikut terdampak pandemi Covid-19. "Kesedihan, keprihatinan dan kebingungan kami menghadapi situasi dan kondisi banyaknya warga yang terparap Covid-19. Ketika warga yang terparap harus diisolasi mandiri seharusnya mendapat bantuan biaya selama isolasi mandiri itu, kami tidak memiliki anggaran untuk menanganinya, kami sadar ini adalah tanggung jawab kami sebagai aparat untuk membantu menyelamatkan warga yang terparap Covid-19 dan kami punya tanggung jawab secara moral karena kami dipilih oleh rakyat," ucapnya.

Ia juga menambahkan sebelum adanya pemotongan, pihaknya telah bermusyawarah dengan berbagai pihak, terutama masyarakat penerima BST.

"Kami sudah mencoba berkoordinasi, dengan pihak terkait seperti TKSK, dan pihak kantor pos untuk mengupdate data penerima BST, tapi kami tidak diberikan kewenangan untuk memperbaiki data penerima BST tersebut. Kalau pun bisa harus menunggu waktu, dari situ kami berpikir menawarkan kepada warga penerima BST periode 5, dan 6 untuk berbagi kepada warga yang terdampak, karena masih banyak warga yang terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah, itupun tidak memaksa, bagi masyarakat yang tidak mau berbagi," ucapnya.

Dia berharap dari pemotongan tersebut, pemerataan bantuan bisa tersalurkan kepada masyarakat. "Dengan ramainya masalah ini, kami berharap berbagai pihak sebaiknya langsung bertanya kepada pemerintah desa dan tidak melalui pihak ketiga karena kami sebagai pemerintah desa mempunyai perangkat kerja yang lengkap, dan memiliki data base juga memiliki rekening bank," katanya.

Diberitakan sebelumnya, warga yang dipotong BST nya berkilah tidak pernah ada musyawarah terkait pemotongan yang dilakukan. "Saya saat ini tengah mendampingi warga, untuk membantu mengungkap alasan pemotongan BST oleh perangkat desa, karena hal ini begitu janggal.

Apalagi kami sudah melakukan audiensi dengan perangkat desa, namun tidak dihadiri kepala desanya, hanya ada sekretaris desa, dan tidak mengetahui adanya surat pernyataan tersebut," kata Roskie Anggawijaya (29) pendamping dari warga yang dipotong BST nya, saat diwawancarai, pada Kamis kemarin. ● **pur**



IDN/ANTARA

BANTUAN MAKANAN UNTUK WARGA ISOMAN DI KOTA BOGOR

Pedagang menyiapkan makanan ketoprak saat pembagian bantuan makanan untuk warga yang sedang isolasi mandiri (isoman) di halaman Gedung Brajamustika, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/8). Pembagian bantuan makanan dengan memberdayakan pelaku UMKM Kota Bogor yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk membantu warga yang sedang isoman dan kurang mampu di masa pandemi COVID-19.

Pokdarwis Puncak Ancam Kibarkan Bendera Putih Lagi

CISARUA (IM)- Menurut permintaan Muspika Cisarua untuk menurunkan bendera putih yang sejak 4 hari lalu dipasangi di sepanjang Jalan Raya Puncak, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kabupaten Bogor menegaskan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah bantuan sosial tetapi peluang usaha.

"Anggota Pokdarwis Kabupaten Bogor terutama yang berusaha di Kawasan Puncak, secara tegas bahwa kesepakatan untuk menurunkan bendera dan diajak bicara bukan untuk meminta bantuan makan ke pemerintah tetapi meminta atau mempermudah peluang usaha demi bisa menafkahi keluarga," tegas Ketua Pokdarwis Kabupaten Bogor, Mas Teguh Mulyana kepada wartawan, Jumat, (6/8).

Pria berusia 57 tahun ini menerangkan sikap tegas Pokdarwis Kabupaten Bogor tersebut merupakan kesepakatan beraga komunitas-komunitas pramuwisata yang tergabung di Pokdarwis.

"Ribuan orang anggota komunitas pramu wisata puncak, paguyuban parkir jalan raya

, paguyuban fotografer, paguyuban pengelola home stay, himpunan pedagang, wisata puncak bersih wisata terisih, turangga giri sewa kuda tunggang, pelaku usaha desa wisata dan pengelola vila meminta pemerintah menormalkan kembali kebijakan pariwisata di Kawasan Puncak maupun Kabupaten Bogor, apalagi selain sudah divaksinasi Covid-19, kami pun siap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19," terangnya.

Bowie sapaan akrabnya menuturkan Pokdarwis Kabupaten Bogor siap ngobrol bareng dengan Muspika Cisarua ataupun Pemkab Bogor untuk bersama-sama mencari solusinya agar pelaku pariwisata tetap eksis dan tugas pemerintah juga tetap berjalan.

"Kami mengikuti aja dulu kemauan Muspika Cisarua maupun Pemkab Bogor yang kemarin sangat merespon aksi dan keluhan pelaku usaha jasa pariwisata di Kawasan Puncak, tapi kalau tidak pasti kebijakannya, kami siap mengibarkan lagi bendera putihnya," tutur Bowie. ● **gio**

TUNGGU PERKEMBANGAN KASUS

Oded Minta Warga Bersabar Merayakan Kemerdekaan RI

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengimbau masyarakat tidak merayakan dan melakukan kegiatan-kegiatan di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di tengah pandemi Covid-19.

"Kota Bandung saat ini masih menerapkan PPKM level 4. Warga harus terus memperhatikan protokol kesehatan (prokes), karena perkembangan covid masih belum melandai," kata Wali Kota Bandung, Oded M Danial pada Jumat (6/8).

Namun begitu, pemerintah kota diturunkan dia tak menutup kemungkinan bahwa perayaan dan kegiatan-kegiatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat dirayakan.

"Tak menutup kemungki-

nan, masyarakat bisa merayakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan 17 an dengan syarat perkembangan kasus covid melandai. Nanti ada perubahan kebijakan," ucapnya.

Diketahui, konfirmasi kasus aktif Covid-19 per 5 Agustus tercatat sebanyak 6.416, dan kasus baru mengalami penurunan sebanyak 435 orang. Sementara konfirmasi sembuh, tercatat total sebanyak 30.749 orang.

Kecamatan Coblong, menjadi yang tertinggi dalam penyebaran Covid-19 dengan total konfirmasi aktif sebanyak 502 orang. Lalu Rancasari 344 orang, Bojongloka Kaler 338 orang, Antapani 312 orang dan Kecamatan Batununggal 296 orang. ● **pur**